

## **POLA PENDIDIKAN DEMOKRASI PANCASILA MELALUI ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**<sup>1</sup>Febri Saefulloh, <sup>2</sup>Kokom Komalasari, <sup>3</sup>Prayoga Bestari**

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

*Email: febri@student.upi.edu*

---

---

### **Abstrak**

Secara filosofis *founding father* berpandangan bahwa demokrasi yang dibangun Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Sistem musyawarah/mufakat adalah nilai asli demokrasi Pancasila yang menghasilkan nilai-nilai tertentu berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat, serta gotong-royong dalam memajukan kehidupan bersama. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pendidikan demokrasi Pancasila yang dilakukan oleh BEM, HMI, GMNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Berbagai teknik pengumpulan data digunakan dalam menghimpun data yang dibutuhkan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri atas para ketua organisasi, anggota pengurus organisasi, dan alumni organisasi dari berbagai organisasi BEM, HMI, GMNI di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Pendidikan Demokrasi Pancasila merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membentuk jiwa kepemimpinan dalam mengelola organisasi mahasiswa. Bentuk pola pendidikan demokrasi Pancasila yang diterapkan adalah bentuk pendidikan kaderisasi sebagai bagian dari menyiapkan kader bagi perkembangan dan keberlangsungan organisasi mahasiswa BEM, HMI, GMNI demi membentuk kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai karakter pancasila melalui program yang dilakukan di organisasi dengan ciri khas masing-masing.

**Kata kunci: Pendidikan, Demokrasi Pancasila, Organisasi Kemahasiswaan.**

### ***Abstract***

*Philosophically, the founding father view that democracy which is built by Indonesia is different from Western democracy. The deliberation / consensus system is the original value of Pancasila democracy which produces certain values based on the principles of deliberation and consensus, as well as mutual cooperation in advancing shared life. This study examined how the Pancasila democracy education pattern is carried out by BEM, HMI, GMNI. This study uses a qualitative approach with comparative descriptive methods. Various data collection techniques are used in gathering the required data, namely observation, interviews, and documentation.*

*The subjects in this study consisted of the chairpersons of the organization, members of the organization's organizers, and alumni of the organization from various BEM, HMI, GMNI organizations at Sultan Ageng Tirtayasa University. The results showed that the Pancasila Democracy Education Pattern was one of the methods used to shape leadership in managing student organizations. The form of Pancasila democracy education pattern applied is a form of cadre education as part of preparing cadres for the development and sustainability of BEM, HMI, GMNI student organizations in order to form leadership based on the values of Pancasila characters through programs conducted in organizations with their respective characteristic.*

**Keywords: Education, Pancasila Democracy, Student Organizations**

---

### 1. Pendahuluan

Cara terbaik dalam membangun demokrasi suatu bangsa adalah dengan membangun keterampilan dan pemahaman tentang Demokrasi Pancasila di warga negara. Proses demokratisasi akan senantiasa menuntut peran serta warga negara dalam proses penanaman nilai-nilai *good citizen*. Bila keterampilan merupakan syarat mutlak pembangunan kualitas demokrasi, maka pendidikan Demokrasi Pancasila adalah cara terbaik membangun keterampilan dan pemahaman warga Negara yang bertanggung jawab. Dengan pendidikan Demokrasi akan tercipta proses menanamkan dan mentransfer nilai-nilai dan pengetahuan nilai-nilai demokrasi. Lebih dari itu dengan pendidikan akan terbangun wawasan-pengetahuan, sikap-kesadaran, serta perilaku yang mendukung terbentuknya budaya demokrasi sebagai penopang proses demokratisasi.

Pembicaraan dan penerapan sistem demokrasi tidak hanya dalam konteks pemerintahan negara saja, akan tetapi

dalam dunia kampus pun mahasiswa mengadopsi sistem yang dinilai paling baik itu. Para aktivis mahasiswa mengagungkan sistem demokrasi yang dilakukan dalam suatu wadah organisasi baik itu *intrauniversiter* maupun *ekstrauniversiter*. Mahasiswa merupakan cendekiawan masa depan yang nantinya akan terjun ke dalam dunia nyata (masyarakat). Oleh karenanya, mahasiswa berorganisasi dengan membentuk *student government* dalam rangka pengembangan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh M. Rusli Karim (1985, hlm. 318) bahwa berorganisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala tata karma didalam organisasi diharapkan tumbuh pula kesadaran semacam itu kelak setelah terjun ke masyarakat.

Keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah perkumpulan/ organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan

hak yang melekat dalam diri mahasiswa yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi pasal 109 ayat 1 point (h) dan (i).

- (h) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi tepatnya pasal 111 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Mengacu kepada peraturan tersebut, penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebesar-

besar dilaksanakan oleh mahasiswa, maka landasan hukum penyelenggaraannya pun merupakan hasil dari kesepakatan anggota yang berhimpun dalam organisasi tersebut dengan tidak bersinggungan dengan aturan dari lembaga (universitas).

Lembaga kemahasiswaan atau organisasi kemahasiswaan (ormawa) adalah wadah pelaksanaan kegiatan mahasiswa di kampus. Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan ormawa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan, integritas kepribadian. Dengan kesadaran yang tumbuh dari pengetahuan dan wawasan politik maka akan terbangun peran positif warga negara dalam proses demokratisasi yang menuju ke arah lebih baik. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang terus berkembang ke arah pembangunan proses demokrasi yang lebih baik tentu harus memulai pembangunan demokrasi dari bagaimana membentuk keterdidikan dan pengetahuan warga negaranya.

Melalui organisasi mahasiswa, mahasiswa akan berdialektika dengan berbagai masalah sosial politik yang akan membangun pemahaman demokrasi mereka secara luas. Menurut Pendapat Chau-kiu Cheung (2010) dalam artikelnya bahwa *“Character education is supposed to meet early adolescents’ need (i.e., eighth and ninth graders) for strengthening social*

*competence. Moreover, adolescents' engagement in character education is integral to their learning from the education". (Cheung & Lee, 2010).*

Sebagaimana yang dikatakan diatas, Untuk membentuk karakter individu ada beberapa faktor salah satunya yaitu melalui organisasi. Organisasi Kepemudaan yang lebih mengenal secara praksis dalam konsep *good citizenship* dan membentuk karakter pancasila dengan mengamalkan konsep nilai sistem demokrasi pancasila yang terkandung didalam sebuah organisasi kepemudaan.

Selain sebagai *miniature state* yang menerapkan trias politika, organisasi kemahasiswaan memiliki nilai yang amat strategis terutama dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan forum tertinggi organisasi kemahasiswaan yaitu musyawarah mahasiswa atau sidang umum. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat", yang mana dalam konteks penelitian ini terkait Demokrasi yang di laksanakan di Organisasi Mahasiswa Intra taupun Ekstra sudah mengaalami pergeseran menjadi demokrasi langsung, tidak menggunakan Konsep Demokrasi Perwakilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aimadudi (2002) dalam Nurmalina, N. dan Syaifullah (2008) bahwa:

"Sokoguru demokrasi, yaitu: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat".

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Almadudi (2002) di atas. Maka sangat nampak bahwa sistem pemerintahan mahasiswa mengacu pada konsep pemerintahan yang demokratis. Selain implementasi konsep demokrasi dalam tubuh organisasi kemahasiswaan, yang menjadi ciri khas dalam sebuah negara demokratis ialah adanya pembagian kekuasaan, pemilihan secara langsung, kebebasan mengemukakan pendapat. Maka dari itu salah satu organisasi kepemudaan juga merupakan salah satu penyokong pembentukan tingkat partisipasi politik generasi muda melalui bentuk-bentuk penyenggaraan pendidikan demokrasi yang dilakukan. Sebagai organisasi mahasiswa merupakan agen kontrol sosial tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan akan lebih menarik untuk diselenggarakan sebagai bagian dari menarik minat mahasiswa ikut menjadi bagian dari organisasi BEM, HMI, GMNI. Pembicaraan dan

penerapan sistem demokrasi tidak hanya dalam konteks pemerintahan negara saja, akan tetapi dalam dunia kampuspun mahasiswa mengadopsi sistem yang dinilai paling baik itu. Para aktivis mahasiswa mengagungkan sistem demokrasi yang dilakukan dalam suatu wadah organisasi baik itu intrauniversiter maupun ekstrauniversiter.

## 2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi komparatif karena berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi *literature*. Untuk mendapatkan data yang kredibel, maka ada beberapa proses yang dilakukan, yakni proses triangulasi dan *member check*. Pada proses triangulasi, jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian triangulasi sumber data yang meliputi Ketua, Anggota, dan Alumni dari Organisasi Kemahasiswaan BEM, HMI, GMNI, di kampus Universitas Sultan AgengTirtayasa. Kemudian proses selanjutnya guna mendapatkan data yang kredibel yaitu proses *member check*. Pada tahap *member check* ini dilakukan konfirmasi kepada setiap informan di akhir wawancara dengan menyebutkan

garis besarnya dengan maksud agar informan memperbaiki bila ada kekeliruan, atau menambahkan apa yang masih kurang. (Sugiyono, 2012).

## 3. Hasil

Pendidikan merupakan instrumen untuk menuju proses mengapai suatu tujuan dalam pendidikan demokrasi yang sangat penting, baik aspek konseptual, maupun penerapan. Tujuan pendidikan demokrasi menurut Manan (2003, hlm. 146) adalah menumbuhkan kesadaran demokrasi, pengetahuan mengenai mekanisme demokrasi seperti *democrtic responsibility, fairness, transparaency, facefui, modarate* dan lain-lain. Dan menurut pendapat Sadiyo (2013, Hlm. 02) Tujuan pendidikan demokratis adalah mempersiapkan warga masyarakat Berpikir kritis dan berperilaku demokratis.). Maka dari pendapat di atas dapat menunjukkan bahwa tujuan pendidikan demokrasi ini sangat penting untuk dicermati, agar tidak terjebak dalam pengetahuan tentang demokrasi semata. Untuk itu perlu pendidikan demokrasi di ikuti oleh latihan berdemokrasi.

Sistem demokrasi merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini dinilai oleh sebagian negara khususnya penganut paham demokrasi sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang paling baik. Menurut Robert A. Dahl, (1992, hlm. XXXVIII) bahwa Demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara

yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dipandang dari segi ilmu politik dan mereka itu secara bersama-sama adalah berdaulat, dan memiliki segala kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan demi untuk memerintah diri mereka sendiri. Dengan adanya faham tersebut mahasiswa sebagai kaum menengah tercerahkan yang senantiasa berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah

organisasi kemahasiswaan pun menerapkan sistem tersebut dalam organisasinya (Ormawa). Pola pendidikan demokrasi di organisasi BEM, HMI, GMNI di UNTIRTA sudah diterapkan dengan baik. Hal inilah yang mendasari BEM, HMI, GMNI, sebagai salah satu organisasi mahasiswa untuk ikut membangun kesadaran dengan nilai-nilai demokrasi pancasila sebagai bagian dari peran serta ikut memajukan bangsa.

**Tabel 1. Pola Pendidikan Demokrasi Pancasila yang Dilakukan oleh BEM**

KETUA	ANGGOTA	ALUMNI
Demokrasi sangat diterapkan dengan baik. Polanya adalah dalam setiap kegiatan selalu ada musyawarah dalam forum, bebas berpendapat, dan hasil yang disepakati dalam forum musyawarah diikuti oleh semua anggota	Demokrasi pancasila di Bem selalu menekankan asas mufakat dan musyawarah dalam program yang latihan kepemimpinan tingkat 3 di Bem universitas agar kader-kader mempunyai jiwa-jiwa pancasilais dan keintelektualan kepemimpinan	Pola pendidikan demokrasi di Bem universitas itu dari pola pendidikan kaderisasinya itu berjenjang dari tingkatan hmj, bem fakultas dan bem universitas, banyak program kerja seperti seminar kebangsaan, seminar kewirausahaan, dialog publicdengan.

Berdasarkan table di atas bentuk pendidikan pola Demokrasi di organisasi kemahasiswaan BEM adalah dimulai kaderisasi program pelatihan kepemimpinan tingkat III, kajian dan diskusi terkait isu-isu kontemporer dengan seminar kebangsaan, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain, serta pemebelajaran politik dalam bentuk diskusi public dan berpartisipasi dalam pemilihan umum mahasiswa tingkatan HMJ sampai Tingkatan Bem Universitas, audiensi dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta kunjungan tokoh. Metode yang digunakan adalah pelatihan, belajar mandiri, kajian materi, serta diskusi internal maupun diskusi

publik, dengan ditambahkan adanya budanya musyawarah dan mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Konstruksi pendididkan demokrasi pancasila sudah cukup terstruktur dimana muatan dan materi serta metode cukup berkorelasi dengan pemahaman pendidikan demokrasi.

Setelah melalui proses pendidikan demokrasi di organisasi diharapkan muncul kesadaran budaya demokrasi pada anggota BEM. Seperti bisa memberikan pandangan terhadap sistem demokrasi yang sudah dijalankan dikampus serta ikut berperan dalam proses pendidikan politik dengan menggunakan hak pilih kewajibanya dalam berpoltik. Menurut

idrus Affandi dalam pengantar buku *political education* dari Brownhill (Sadeli dkk 2009, hlm V) bahwa pendidikan politik adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik harus

berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

**Tabel 2. Pola Pendidikan Demokrasi Pancasila Yang Dilakukan Oleh HMI**

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM		
KETUA	ANGGOTA	ALUMNI
HMI sudah terbiasa menggunakan budaya demokrasi Pancasila, salah satunya bebas berpikir dan berpendapat, serta mengkritik apabila organisasi itu keluar dari nilai marwah hmml	HMI kita diberi kebebasan dalam berfikir, membaca buku yang bagaimana asal dari membaca bisa menambah wawasan para kader. program kerja yang melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi dan menerapkan nilai-nilai demokrasi.	HMI pola pendidikan demokrasi yang ada di HMI sudah tertuang ke dalam program kerja di HMI itu kajian dan diskusi, dari kajian dan diskusi tersebut, dan latihan kepemimpinan tingkat 2 dan 3.

Selanjutnyaterkait pemaparan diatas dari organisasi HMI di kampus universitas sultan ageng tirtayasa pola pendidikan organisasi HMI dalam bentuk dimulai dari pola kaderisasi dasar program pelatihan tingkatkat 1, kajian tentang materi (Negara, keislaman, ekonomi, hukum) dan diskusi tentang isu-isu terkini dari isu kampus, regional, dan nasional, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain, serta pemebelajaran politik dalam bentuk pelatihan penanaman wawasan berpolitik.budanya yang terbentuk di HMI itu alami dalam artian boleh berbeda pendapat dengan jalur masing-masing, contoh dalam pemilu kampus, daerah ataupun nasional, dan keberamana di HMI itu menjadi rahmat yang sudah ada sendiri, karena ada faktor independensi di setiap kader

dalam melakukan, berpendapat. Maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita. insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Untuk terwujudnya individu yang memiliki kualitas insan cita itu salah satunya melalui pelatihan perkaderan yaitu Latihan Kader.

Agar para kader memahami betul ideologi HMI agar terbentuk manusia yang memahami demokrasi dengan nilai-nilai pancasila. Menurut pendapat Kaelan (2013, hlm. 61) mengemukakan bahwa ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Ideologi merupakan suatu sistem pemikiran.

Ibrahim (2010, hlm. 137) mengemukakan bahwa ideologi adalah merupakan sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, dan berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, ideologi berbeda dengan “pandangan hidup” maupun “filsafat”. Ideologi merupakan sistem pemikiran ini di gali dan di rumuskan ke dalam gagasan yang memuat perwujudan cita-

cita kebangsaan suatu negara. Aprizon (2013, hlm. 5) pengertian ideologi telah mengalami pergeseran begitu rupa sehingga bukan lagi sebagai *Science of ideas*. Ideologi berkembang menjadi pengertian yang mengandung arti sebagai gagasan, ide-ide yang semula merupakan sasaran pengkajian dalam *Science of ideas* tersebut. Lebih lanjut, ideologi mengandung arti bukan hanya gagasan atau pemikiran, melainkan sebagai keyakinan.

**Tabel 3. Pola Pendidikan Demokrasi Pancasila Yang Dilakukan Oleh GMNI**

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA		
KETUA	ANGGOTA	ALUMNI
Terkait demokrasi pancasila yang di jalankan di internal GMNI sendiri pendapat anggota tidak di batasai, namun dalam menjalankan proker GMNI disini musyarawah mufakat, dan diskusi isu-isu kontemporer	Mengamalkan nilai-nilai pancasila dan marhaenisme di ruang- ruang diskusi atau kajian setiap minggu, agar dapat melatih publick speaking	Para kader wajib memahami idelogi GMNI dengan membaca buku pemikiran soekarno, pancasila 1 juni, dan mengikuti kegiatan program kerja dan tingkatan kaderisasi dari komisariat, cabang, sampai gmni pusat nasional.

Selanjutnya dalam pola pendidikan demokrasi pancasila menurut tabel diatas di organisasi kemahasiswaan GMNI universitas sultan ageng tirtayasa dapat kita simpulkan bahwa bentuk pendidikan demokrasi GMNI dimulai dari program kaderisasi pelatihan kaderisasi tingkat I, bentuk kajian tentang Marhaenisme, Pancasila 1 juni 1945, serta berazaskan ketuhanan yang maha esa, dan diskusi isu-isu yang kontemporer untuk pengutan pemahaman para kader, serta pelatihan dalam bidang-bidang atau program yang lain. Budaya organisasi GMNI dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI, serta

dalam anggota kader gmni untirta sangat bermacam-macam contohnya saja adalah dalam hal keyakinan agama, organisassi gmni sangat bervariasi dalam hal keyakinan beragama, itulah salah satu organisasi GMNI menjalan nilai-nilai pancasila, dan dalam mengambil keputusan organisasi menggunakan musyawarah dan mufakat dalam setiap program yang harus didiskusikan dengan para kader GMNI. Karena Marhaenisme bertujuan untuk mengangkat derajat golongan kecil yang dalam istilah Soekarno disebut kaum Marhaen dengan tiga konsep dasar diatas; sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa.

Sosio Nasionalisme adalah satu asas kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai semangat kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul dan tumbuh dalam sejarah ketertindasan bangsa oleh kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu nilai-nilai yang dianut oleh nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai kebangsaan yang menginginkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, *zonder exploitation de l'homme par l'homme dan zonder exploitation de nation par nation*, dan bersifat melindungi serta menyelamatkan kehidupan seluruh Rakyat Indonesia. Sosio-Nasionalisme adalah ide yang dijadikan sebagai asas pergaulan hidup bangsa yang dilandasi oleh semangat cinta terhadap manusia dan kemanusiaan, sebuah susunan masyarakat yang tidak chauvist melainkan humanis, tegas dan revolusioner terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh feodalisme, kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme sebagai sebuah kesadaran dan keharusan sejarah (*historische notwendeigheid*).

#### 4. Pembahasan

pendidikan pola demokrasi di organisasi kemahasiswaan BEM adalah dimulai kaderisasi program pelatihan kepemimpinan tingkat III, kajian dan diskusi terkait isu-isu kontemporer dengan seminar kebangsaan, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain, serta pemebelajaran politik dalam bentuk diskusi public dan berpartisipasi dalam pemilihan umum mahasiswa tingkatan

HMJ sampai Tingkatan Bem Universitas, audiensi dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta kunjungan tokoh. Metode yang digunakan adalah pelatihan, belajar mandiri, kajian materi, serta diskusi internal maupun diskusi publik, dengan ditambahkan adanya budanya musyawarah dan mufakat dalam setiap mengambil keputusan. Konstruksi pendididkan demokrasi pancasila sudah cukup terstruktur dimana muatan dan materi serta metode cukup berkorelasi dengan pemahamhan pendidikan demokrasi, Serta menumbuh kembangkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam bingkai organisasi yang dilakukan disetiap kegiatan dan tingkah laku untuk para kader BEM UNTIRTA.

Setelah melalui proses pendidikan demokrasi di organisasi diharapkan muncul kesadaran budaya demokrasi pada anggota BEM. Seperti bisa memberikan pandangan terhadap sistem demokrasi yang sudah dijalankan dikampus serta ikut berperan dalam proses pendidikan politik dengan menggunakan hak pilih kewajiabanya dalam berpoltik. Menurut idrus Affandi dalam pengantar buku *political education* dari Brownhill (Sadeli dkk 2009, hlm V) bahwa pendidikan politik adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesimnambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan poltitik harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari

keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Organisasi HMI di kampus universitas sultan ageng tirtayasa pola pendidikan organisasi HMI dalam bentuk dimulai dari pola kaderisasi dasar program pelatihan tingkat 1, kajian tentang materi (Negara, keislaman, ekonomi, hukum) dan diskusi tentang isu-isu terkini dari isu kampus, regional, dan nasional, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dan lain-lain, serta pemebelajaran politik dalam bentuk pelatihan penanaman wawasan berpolitik. budayanya yang terbentuk di HMI itu alami dalam artian boleh berbeda pendapat dengan jalur masing-masing, contoh dalam pemilu kampus, daerah ataupun nasional, dan keberamana di HMI itu menjadi rahmat yang sudah ada sendiri, karena ada faktor independensi di setiap kader dalam melakukan, berpendapat. Maka pada hakikatnya seluruh aktivitas HMI merupakan proses pembinaan terhadap kader HMI agar setiap individu kader memiliki kualitas insan cita.

Kualitas Insan Cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 5 AD HMI) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Insan Akademis

1) Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis.

2) Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran.

3) Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

b. Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta

1) Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.

2) Bersifat independen, terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi, sehingga dengan demikian kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah.

- 3) Dengan memiliki kemampuan akademis dan mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran Islam.
- c. Kualitas Insan Pengabdian : Insan Akademis, Pencipta, Pengabdian
- 1) Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan umat dan bangsa.
  - 2) Sadar membawa tugas insan pengabdian, bukan hanya sanggup membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik.
  - 3) Insan akademis, pencipta dan pengabdian adalah insan yang bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat dan bangsa.
- d. Kualitas Insan yang Bernafaskan Islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdian yang Bernafaskan Islam.
- 1) Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola pikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menjadi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya.
  - 2) Ajaran Islam telah berhasil membentuk "unity personality" dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari *split personality* tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia dan sebaliknya.
- e. Kualitas Insan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi oleh Allah SWT
- 1) Insan akademis, pencipta dan pengabdian yang Bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.
  - 2) Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya dan sadar dalam menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral.
  - 3) Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis.
  - 4) Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.
  - 5) Evaluatif dan selektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

- 6) Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai "*khallifah fil ard*" yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Untuk terwujudnya individu yang memiliki kualitas insan cita itu salah satunya melalui pelatihan perkaderan yaitu Latihan Kader. Agar para kader memahami betul ideologi HMI agar terbentuk manusia yang memahami demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendapat Kaelan (2013, hlm. 61) mengemukakan bahwa ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita. Ideologi merupakan suatu sistem pemikiran. Ibrahim (2010, hlm. 137) mengemukakan bahwa ideologi adalah merupakan sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, dan berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, ideologi berbeda dengan "pandangan hidup" maupun "filsafat". Ideologi merupakan sistem pemikiran ini di gali dan di rumuskan ke dalam gagasan yang memuat perwujudan cita-cita kebangsaan suatu negara. Aprizon (hlm. 5) pengertian ideologi telah mengalami pergeseran begitu rupa sehingga bukan lagi sebagai *Science of ideas*. Ideologi berkembang menjadi pengertian yang mengandung arti sebagai gagasan, ide-ide yang semula

merupakan sasaran pengkajian dalam *Science of ideas* tersebut. Lebih lanjut, ideologi mengandung arti bukan hanya gagasan atau pemikiran, melainkan sebagai keyakinan.

Pendidikan demokrasi Pancasila organisasi kemahasiswaan GMNI universitas sultan ageng tirtayasa dapat kita simpulkan bahwa bentuk pendidikan demokrasi GMNI dimulai dari program kaderisasi pelatihan kaderisasi tingkat I, bentuk kajian tentang Marhaenisme, Pancasila 1 juni 1945, serta berazaskan ketuhanan yang maha esa, dan diskusi isu-isu yang kontemporer untuk penguatan pemahaman para kader, serta pelatihan dalam bidang-bidang atau program yang lain. Budaya organisasi GMNI dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI, serta dalam anggota kader gmni untirta sangat bermacam-macam contohnya saja adalah dalam hal keyakinan agama, organisasi gmni sangat bervariasi dalam hal keyakinan beragama, itulah salah satu organisasi GMNI menjalan nilai-nilai Pancasila, dan dalam mengambil keputusan organisasi menggunakan musyawarah dan mufakat dalam setiap program yang harus didiskusikan dengan para kader GMNI. Karena Marhaenisme bertujuan untuk mengangkat derajat golongan kecil yang dalam istilah Soekarno disebut kaum Marhaen dengan tiga konsep dasar diatas; sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang maha esa.

Sosio Nasionalisme adalah satu asas kehidupan rakyat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai semangat kebangsaan Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul dan tumbuh dalam sejarah ketertindasan bangsa oleh kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu nilai-nilai yang dianut oleh nasionalisme Indonesia adalah nilai-nilai kebangsaan yang menginginkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, *zonder exploitation de l'homme par l'homme dan zonder exploitation de nation par nation*, dan bersifat melindungi serta menyelamatkan kehidupan seluruh Rakyat Indonesia. Sosio-Nasionalisme adalah ide yang dijadikan sebagai asas pergaulan hidup bangsa yang dilandasi oleh semangat cinta terhadap manusia dan kemanusiaan, sebuah susunan masyarakat yang tidak chauvist melainkan humanis, tegas dan revolusioner terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh feodalisme, kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme sebagai sebuah kesadaran dan keharusan sejarah (*historische notwendeigheid*).

## 6. Referensi

- Aprizon, R. (2013). Analisis Sikap Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa. *Jurnal Kultur Demokrasi Vol. 1, No. 6*.
- Cheung, C, & L, T. (2010) Improving social competence through character education. *Evaluation and Program Planning*, 33(3), 255-263.
- Ibrahim. Anis. (2010). Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan. *Jurnal Konstitusi, Vol. III. No. 2*.
- Kaelan. (2013). *Negara Paripurna*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, M. Rusli. (1985). *Mahasiswa Cendekiawan Dan Masa Depan*. Bandung: Alumni.
- Manan. B. (2003). *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 FH*. Yogyakarta: UII Press.

## 5. Kesimpulan

Gender dan status sosial ekonomi berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan jabatan orang tua tidak berkontribusi secara signifikan dengan prestasi belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.

Kehadiran kuliah memiliki hasil yang signifikan namun tidak berkontribusi dengan prestasi belajar. Sedangkan ststua sosial ekonomi berdasarkan jabatan orang tua berkontribusi secara signifikan dengan prestasi belajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan motivasi belajar mahasiswa tanpa membedakan kehadiran kuliah, gender dan status sosial ekonomi orang tua sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik.

Adapun saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan menggunakan model logistik dan adanya penambahan variabel personaliti.

- Nurmalina K. Dkk. (2008). *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sadeli, Ely H, dkk. (2009). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung: Kencana Utama.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

**Sumber Peraturan dan Perundang-undangan**

- Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.